

Usaha-Usaha Perbaikan Ekonomi Era Demokrasi Liberal (1950-1959)

Khopipah Fauziah ✉

Ilmu Sejarah, Universitas Negeri Semarang

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima September 2023
Disetujui November 2023
Dipublikasikan Desember 2023

Keywords:
Demokrasi Liberal, Gunting Syafruddin, Gerakan Benteng, Ali-Baba

Abstrak

Pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal berdampak terhadap pemerintahan terutama dalam bidang ekonomi. Perubahan-perubahan ini akibat dari sering bergantinya kebijakan sesuai dengan kabinet yang berkuasa. Maka pada tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tiga rumusan masalah pokok yaitu: (1) Kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh kabinet-kabinet yang sedang berkuasa; (2) Pelaksanaan kebijakan ekonomi; (3) Dampak yang ditimbulkan dari kebijakan ekonomi tersebut. Penulisan artikel ini menggunakan analisis sumber, kritik sumber, penafsiran dan penulisan (historiografi). Adapun hasil dari penulisan ini yaitu (1) Kebijakan ekonomi yang diterapkan berbeda-beda di setiap kabinet misalnya seperti Gunting Syafruddin, Gerakan Benteng, Nasionalisasi De Javasche Bank, Gerakan Ali-Baba, Persetujuan Finansial Ekonomi, Rencana Pembangunan Lima Tahun dan Musyawarah Nasional Pembangunan. (2) Dalam pelaksanaannya, usaha-usaha perbaikan ekonomi ini mengalami kegagalan. (3) Adapun dampaknya yaitu berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara Indonesia.

Abstract

Cabinet changes during the liberal democracy period had an impact on the government, especially in the economic field. These changes were the result of frequent changes in policy in accordance with the ruling cabinet. So this paper aims to describe and analyze three main problem formulations, namely: (1) Economic policies implemented by the cabinets in power; (2) Implementation of economic policies; (3) The impact of these economic policies. The writing of this article uses source analysis, source criticism, interpretation and writing (historiography). The results of this writing are (1) The economic policies implemented vary in each cabinet, such as the Syafruddin Scissors, the Benteng Movement, the Nationalization of De Javasche Bank, the Ali-Baba Movement, the Economic Financial Agreement, the Five-Year Development Plan and the National Development Conference. (2) In its implementation, these efforts to improve the economy failed. (3) As for the impact, it affected the life of the Indonesian nation and state.

© 2023 Universitas Negeri Semarang

PENDAHULUAN

Sidang pada tanggal 6 hingga 15 Desember 1949 mengesahkan hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) oleh KNIP dengan terbentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS). Negara ini memiliki 16 negara bagian dan dalam sidang bersama Parlemen dan Senat RI terpilihlah Soekarno sebagai presidennya pada 16 Desember 1949 (Poesponegoro, 2011: 301). Sebagai negara parlementer, RIS di bawah pemerintahan Kabinet RIS yang dipimpin oleh Hatta.

Dalam pemerintahan yang kurang dari satu tahun ini, Hatta harus menyelesaikan berbagai masalah akibat perang kemerdekaan dan masalah-masalah internal lainnya termasuk dalam ini masalah sistem ekonomi. Perang kemerdekaan menyebabkan banyaknya sarana dan prasarana yang rusak berat bahkan hancur. Keadaan ekonomi yang buruk diperparah dengan adanya inflasi dan defisit anggaran belanja (Malintan, 2019: 55).

Meskipun RIS merupakan hasil kompromi antara RI dengan negara-negara bagian lainnya. Namun, masyarakat masih tetap menghendaki sebuah negara kesatuan. Dari awal telah ada gerakan-gerakan untuk menuntut pembubaran negara serikat ini melalui berbagai pemberontakan seperti pemberontakan APRA, pemberontakan Andi Aziz dan gerakan-gerakan lainnya (Poesponegoro, 2011: 304). Dengan melalui berbagai hal, akhirnya terjadi kesepakatan antara RIS dan RI untuk membentuk negara kesatuan pada 19 Mei 1950 (poesponegoro, 2011: 305).

Tindak lanjut dari kesepakatan tersebut kemudian dibentuklah Panitia Persiapan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan dengan Prof. Supomo sebagai ketuanya. Rancangan UUD negara kesatuan diterima oleh Senat, Parlemen

RIS dan KNIP sehingga pada tanggal 15 Agustus 1950, Soekarno menandatangani rancangan UUD tersebut. Rancangan ini kemudian dikenal dengan UUDS 1950 (Undang-Undang Dasar Sementara 1950). Dengan demikian pada tanggal 17 Agustus 1950 RIS dibubarkan dan Indonesia kembali ke negara kesatuan.

Oleh karena itu, tulisan ini ingin membahas mengenai kehidupan ekonomi pada masa demokrasi liberal dan bagaimana pemerintah yang berkuasa dalam mengatasi masalah-masalah ekonomi yang ada serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat Indonesia.

METODE

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian sejarah melalui empat tahapan. Dimulai dari pengumpulan sumber (heuristik), sumber yang digunakan berupa buku, jurnal, koran dan sumber lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Selanjutnya yaitu kritik sumber (verifikasi) dan penafsiran (interpretasi) untuk menghasilkan data dan fakta yang sesuai dengan penelitian. Lalu diakhiri dengan penulisan sejarah (historiografi).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem ekonomi yang diterapkan pada masa demokrasi liberal dimana setiap perubahan dari sistem tersebut akan berdampak terhadap kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah yang berkuasa. Sistem ekonomi pada masa ini memberikan kebebasan kepada individu untuk melakukan kegiatan ekonomi demi keuntungan sebesar-besarnya namun di dalam pelaksanaannya tidak berjalan dengan lancar karena beberapa alasan yaitu setelah penyerahan

kedaulatan, Indonesia harus menanggung beban ekonomi dan keuangan berupa utang luar negeri sebesar Rp1,5 triliun dan utang dalam negeri sebesar Rp2,8 triliun. Politik keuangan yang dibuat oleh Belanda dan tidak adanya ahli ekonomi yang diwarisi dari Belanda untuk mengubah dari ekonomi kolonial ke ekonomi nasional (Poesponegoro, 2011). Ketidakstabilan politik dalam negeri membuat pengeluaran untuk operasi keamanan semakin membengkak. Defisit anggaran hingga mencapai Rp5,1 miliar. Selain itu, ekspor yang ada hanya bergantung pada hasil pertanian dan hasil perkebunan serta pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat.

Defisit anggaran ini mulai ditanggulangi dengan cara melakukan pinjaman luar negeri sebesar Rp1,6 miliar dan kredit sebesar Rp200 juta melalui sidang Uni Indonesia-Belanda. Pinjaman-pinjaman ini untuk mengatasi masalah dalam jangka pendek seperti mengurangi uang yang beredar di pasaran dan mengatasi kenaikan biaya hidup. Sementara itu, untuk masalah jangka panjang diperlukan usaha-usaha yang lebih kompleks untuk mengatasinya (Muwafiq, 2022).

Pada masa Kabinet Hatta, program kerja dalam bidang ekonomi yaitu berusaha untuk memperbaiki keadaan ekonomi rakyat, keuangan, persiapan jaminan sosial, perumahan, kesehatan serta penempatan tenaga. Namun, ternyata perbaikan dalam bidang ekonomi ini tidak mudah karena adanya inflasi dan defisit anggaran belanja. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah inflasi tersebut Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara melakukan kebijakan yang bernama Gunting Syafruddin yang dikeluarkan pada 19 Maret 1950 (Myeisha, 2020: 73).

Gunting Syafruddin

Melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan RIS Nomor PU I Tanggal 19 Maret 1950 dikeluarkanlah kebijakan mengenai pemotongan nilai uang. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi defisit anggaran Rp5,1 miliar dan mengurangi peredaran uang dipasaran yang menyebabkan inflasi.

Kebijakan yang mulai berlaku pada 20 Maret 1950 tepat pukul 20.00 WIB ini mengejutkan banyak pihak. Adapun ketentuan dari Gunting Syafruddin yaitu uang yang bernilai 5 gulden ke atas dipotong menjadi dua sehingga nilainya menjadi setengahnya (Poesponegoro, 2011: 302-303). Mata uang yang dipotong yaitu mata uang NICA dan mata uang De Javasche Bank, guntingan sebelah kiri digunakan sebagai alat pembayaran sementara guntingan sebelah kanan dibayar tiga puluh tahun kemudian oleh negara dengan bunga tiga persen dalam setahun (Azizah, 2019).

Pada 22 Maret 1950 hingga 16 April 1950, bagian sebelah kiri harus ditukarkan dengan uang kertas baru di bank atau tempat yang sudah ditentukan. Jika tidak ditukarkan dalam batas waktu di atas maka konsekuensinya uang bagian kiri tidak dapat digunakan lagi. Menurut Ki Agus Ahmad Badaruddin, selain untuk menyeimbangkan jumlah uang yang beredar juga untuk mengganti mata uang yang telah ada (Abdurakhman, 2018).

Kebijakan Gunting Syafruddin berdampak ke pemilik uang namun menghasilkan sesuatu karena pemerintah mulai bisa mengendalikan inflasi agar tidak meningkat lagi. Bagi masyarakat menengah ke bawah yang tidak dirugikan oleh kebijakan ini karena hanya orang-orang kelas menengah ke atas saja yang memiliki uang Rp2,50 ke atas. Sehingga kebijakan ini

sedikit mampu mengurangi mata uang yang beredar dan mendapat pinjaman dari pemerintah Belanda sebesar Rp200 juta. Terjadinya Perang Korea membuat perdagangan ke luar negeri menjadi meningkat terutama mentah. Peningkatan ekspor membuat pendapatan negara juga meningkat pula.

Kebijakan ini memang berhasil mengurangi jumlah mata uang yang beredar dan inflasi menjadi turun. Namun, dalam jangka panjang kebijakan ini membuat kekacauan dalam bidang ekonomi. Dimana pada 1953, harga bahan pokok meningkat hingga 250 persen dari tahun 1950, uang yang beredar terus meningkat dan inflasi juga turut meningkat. Para pelaku ekonomi dengan modal yang banyak menimbun barang kebutuhan masyarakat sehingga terjadi kelangkaan dan membebani rakyat dan pedagang kecil.



Iklan mengenai Kebijakan Gunting Syafruddin dalam mingguan Sedar edisi 10 November 1950

Dengan berakhirnya Republik Indonesia Serikat, negara-negara bagian lain seperti Negara Pasundan, Negara Indonesia Timur dan negara bagian lainnya sepakat untuk masuk ke dalam bagian NKRI. Sehingga digantikan UUD RIS dengan UUDS 1950 yang mulai diberlakukan pada 17 Agustus 1950. Dalam UUDS 1950, Indonesia menganut sistem demokrasi liberal dimana Presiden sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan dan bertanggung jawab kepada parlemen. Oleh

karena itu, kebijakan ekonomi yang ada pun tergantung kabinet yang sedang berkuasa pada masa itu sehingga memiliki perbedaan satu sama lain.

Pada masa demokrasi liberal ini terdapat tujuh kabinet yang ikut mewarnai kehidupan perpolitikan dan perekonomian dalam masyarakat Indonesia. Diawali oleh Kabinet Natsir (September 1950 – Maret 1951), Kabinet Sukiman (April 1951 – April 1952), Kabinet Wilopo (April 1952 – Juli 1953), Kabinet Ali Sastroamidjojo I (Juli 1953 – Agustus 1955), Kabinet Burhanuddin Harahap (Agustus 1955 – Maret 1956), Kabinet Ali Sastroamidjojo II (Maret 1956 – Maret 1957), dan Kabinet Djuanda (Maret 1957 – Juli 1959). Adapun kebijakan-kebijakan yang dicetuskan untuk mengatasi masalah ekonomi adalah sebagai berikut:

Gerakan Benteng

Adapun dalam kebijakan ekonomi Kabinet Natsir yaitu untuk mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat, Kabinet Natsir dengan menteri perdagangannya yaitu Soemitro Djojohadikusumo mencetuskan rencana Sumitro Plan. Sumitro Plan mulai direncanakan pada April 1951 yang dicetuskan oleh Menteri Sumitro karena saat itu kebutuhan Indonesia cukup mendesak dalam pertumbuhan ekonomi pertanian dan industri. Gagasan ini kemudian dinamakan dengan Program Ekonomi Gerakan Benteng atau Program Benteng. Program ini menyorot pada pembentukan modal besar melalui kegiatan impor yang menguntungkan sehingga memungkinkan untuk memulai usaha mendirikan industri kecil. Dengan adanya ekonomi Gerakan Benteng ini diharapkan dapat mengubah struktur ekonomi yang dirasa berat sebelah karena hanya

berpihak atau mengedepankan kepentingan asing saja.

Kebijakan ini memberikan modal dan pelatihan bagi pengusaha pribumi sehingga diharapkan dapat mengimbangi pengusaha asing misalnya seperti etnis Tionghoa. Dengan keberadaan program ini, pribumi diberi kewenangan impor khusus yang mana mereka bisa menerima devisa dengan kurs murah. Pengusaha pribumi juga diberikan bantuan dan kredit dimana sebanyak 700 perusahaan pribumi menerimanya.

Kebijakan ekonomi Gerakan Benteng yang digagas oleh Sumitro ternyata tidak membuahkan hasil. Hal ini karena terjadi banyak penyelewengan dalam pelaksanaannya sehingga memberikan kerugian besar bagi pemerintah. Tak tanggung-tanggung, akibat dari program ini mengakibatkan defisit anggaran hingga 3 miliar pada 1952. Adapun penyebab kegagalan gerakan ekonomi ini adalah pengusaha pribumi bersifat konsumtif dimana mereka menggunakan modal yang diberikan pemerintah untuk berfoya-foya dan pemenuhan kebutuhan pribadi. Pengusaha pribumi juga lebih bergantung kepada arahan pemerintah dan kurang adanya inisiatif dari diri sendiri. Bantuan yang digunakan disalahgunakan misalnya seperti menjual lisensi hak impor istimewa (aktentas) ke importir yang telah mapan. Hal ini justru membuat importir tersebut menjadi lebih berkembang perusahaannya. Selain itu, bantuan ini dianggap sebagai diskriminasi etnis Tionghoa yang juga merupakan orang Indonesia. Oleh karena itu, sistem ekonomi ini dihentikan pada April 1957.

Nasionalisasi De Javasche Bank

Program kerja Kabinet Sukiman dalam bidang ekonomi yaitu membuat dan

melaksanakan rencana kemakmuran nasional jangka pendek untuk mempertinggi sosial ekonomi rakyat, perbaruan hukum agrarian sesuai kepentingan petani serta mempercepat usaha penempatan bekas pejuang dalam lapangan pembangunan. Selain itu, kabinet ini juga mempersiapkan UU yang mengatur serikat buruh, perjanjian kerja sama, penetapan UMR, dan penyelesaian pertikaian buruh.

Pada 22 Mei 1951, terjadi peristiwa nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan dan penurunan biaya ekspor. Nasionalisasi dilakukan dengan cara membeli saham-saham di De Javasche Bank. Selain itu, nasionalisasi dilanjutkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Bank Indonesia yang disahkan melalui Lembaran Negara No. 40 Tahun 1953. Ketika undang-undang tersebut diberlakukan, maka Bank Indonesia bukan hanya sebagai bank sirkulasi tetapi juga menjadi Bank Sentral RI.

Nasionalisasi De Javasche Bank mendapatkan sambutan dan antusias yang besar dari masyarakat Indonesia. Dalam beberapa surat kabar disebutkan bahwa dengan adanya Bank Indonesia akan menjadi pembuka zaman baru dalam bidang keuangan. Misalnya dalam terbitan surat kabar Merdeka pada 9 Juli 1953 yang menyebutkan "...hendaknya tanggal 1 Juli 1953 kita pandang sebagai hari peresmian perubahan tujuan dan maksud pemerintah dan bank sentralnya, sesuai dengan cita-cita tiap-tiap negara yang betul-betul merdeka politik maupun ekonomis." Dari kutipan tersebut dapat dilihat bahwa Bank Indonesia diharapkan dapat membawa perubahan baik dalam segi politik maupun ekonomi. Namun, pada masa kabinet Sukiman terjadi defisit anggaran hal ini akibat dari

nasionalisasi De Javasche Bank dan penurunan ekspor akibat dari bom Korea.

Kebijakan Ekonomi Kabinet Wilopo

Kabinet Wilopo dimulai dari 3 April 1952 hingga 3 Juni 1953 dimana kabinet ini terdiri dari orang-orang yang ahli di bidangnya (zaken kabinet). Program kerja kabinet ini dalam bidang ekonomi yaitu menjanjikan kemakmuran sosial yang adil dan juga setara, mengatasi defisit anggaran serta melanjutkan usaha perubahan agrarian. Menjanjikan kemakmuran rakyat dengan cara menambah produksi nasional terutama di bahan makanan untuk rakyat. Hal ini bertujuan untuk melakukan upaya kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi dimana setidak-tidaknya masyarakat bisa memenuhi bahan makanan pokok untuk sehari-hari. Sehingga diharapkan masyarakat dapat meningkatkan hidupnya agar lebih layak dan membantu dalam pembangunan di negeri ini.

Melanjutkan dari kabinet sebelumnya yaitu usaha perubahan agraria yang mana diperkuat dengan mata pencaharian rakyat yang sebagian besar adalah petani. Selain untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, hal ini diupayakan agar hasil pertanian tersebut dapat diekspor. Adapun undang-undang yang mendukung usaha perubahan agrarian yaitu Undang-Undang Darurat RI Nomor 1 Tahun 1952 tentang Pemindahan dan Pemakaian Tanah-Tanah dan Barang-Barang Tetap yang Lainnya yang Mempunyai Titel Menurut Hukum Eropa, UU RI Nomor 5 Tahun 1951 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1951 untuk Mengubah *Grondhuur Ordonantie* dan *Vorstenlandsch Grondhuurreglement* sebagai Undang-Undang.

Kebijakan-kebijakan yang dijalankan oleh Kabinet Wilopo sendiri ternyata mengalami kegagalan. Misalnya dalam mencapai kemakmuran rakyat ditemukan hambatan berupa kondisi perekonomian yang mengalami penurunan baik itu akibat dari defisit anggaran Kabinet Sukiman, banyaknya korupsi, inflasi yang tinggi yang kemudian berdampak kembali terhadap defisit kas negara. Masalah lain yaitu perkebunan-perkebunan dan industri rusak berat serta dengan penambahan penduduk yang meningkat. Hal ini kemudian berdampak kepada kurangnya produksi pangan dan tidak bisa mencukupi kebutuhan yang ada. Di Jawa misalnya produksi beras perkapita menurun dari tahun 1950-1960. Oleh karena itu, import bahan pangan masih dilakukan. Dampak lainnya yaitu banyaknya tenaga kerja dan sedikitnya lahan pertanian membuat banyak keluarga tidak dapat mencukupi untuk menghidupi keluarganya sehingga terjadi urbanisasi. Keadaan ekonomi yang semakin memburuk ini membuat harga karet dan ekspor yang lainnya turun hingga 71% yang tentunya menyebabkan pemasukan kas negara menjadi sedikit. Gerakan Benteng tidak membuahkan hasil sama sekali dimana tidak adanya pengusaha pribumi yang bisa menjadi pengusaha mandiri. Ketidakpuasan ini kemudian menimbulkan pemberontakan, gerakan hingga berakhir pada mosi tidak percaya yang membuat kabinet ini harus mengembalikan mandatnya kepada presiden.

Kebijakan Ekonomi Ali-Baba

Adapun program kerja ekonomi dari kabinet Ali I yaitu mempercepat terbentuknya perundang-undangan nasional, di lapangan keamanan, kemakmuran, keuangan dan kewarganegaraan. Selain itu yang paling penting

memperbaiki hubungan dengan China sehingga nantinya terbentuk sistem ekonomi Ali-Baba yang mana merupakan kerja sama antara pengusaha pribumi dengan pengusaha Tionghoa.

Akibat dari Perang Korea dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia tidak dapat diatasi oleh kabinet-kabinet sebelumnya. Hal ini menyebabkan inflasi pada 1952-1953 serta penurunan nilai tukar rupiah menjadi 44,7% dari nilai resmi menjadi 24,6% sehingga eksportir di luar Pulau Jawa terkena imbas dan mengalami kerugian. Penyelundupan semakin meningkat sehingga mempermarah kondisi masyarakat. Ali kemudian berusaha untuk memperbaiki keadaan ini dengan menekan perekonomian dan dorongan kepada pengusaha pribumi. Sistem ekonomi Ali Baba memberikan bantuan kredit dan lisensi untuk usaha swasta nasional, perlindungan pengusaha lokal agar dapat bersaing serta pengusaha lokal diharapkan agar memberikan pelatihan dan tanggung jawab kepada pekerja Indonesia agar dapat menduduki jabatan-jabatan.

Dalam kabinet Ali I, masalah-masalah yang menghadang dari sistem ekonomi yaitu usaha pengindonesasian ekonomi dan dorongan terhadap pribumi. Sistem ekonomi Ali-Baba ini ternyata dalam prakteknya tidak sedemikian rupa. Terjadi banyak pelanggaran dan penyelewengan di dalamnya. Kredit yang digunakan tidak dimanfaatkan secara baik dan malah dipindah tangankan ke pengusaha Tionghoa. Kredit yang seharusnya untuk kegiatan produksi malah digunakan untuk kegiatan pribadi dan konsumsi. Serta pengusaha lokal tidak bisa memanfaatkan kredit secara maksimal sehingga tidak dapat melihat dampak positif dari kegiatan ekonomi Ali-Baba ini terhadap perkembangan perekonomian Indonesia. Penyelewengan lain yaitu ketika pengusaha asing meminjam nama

pribumi untuk mendapatkan bantuan kredit tersebut. Belum lagi pergolakan-pergolakan yang terjadi semakin menguras keuangan negara sehingga semakin memperburuk keadaan ekonomi Indonesia.

Persetujuan Finansial Ekonomi (Finek)

Pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap, delegasi dikirimkan ke Jenewa untuk merundingkan masalah finansial-ekonomi pihak Indonesia dan Belanda sehingga dicapai kesepakatan rencana persetujuan Finek (Finansial Ekonomi). Dari kesepakatan ini dicapai yaitu hubungan Finek Indonesia-Belanda berdasarkan hubungan bilateral, berdasarkan Undang-Undang Nasional dan tidak boleh diikat oleh perjanjian lain. Hal ini mengalami kegagalan karena Belanda tidak mau menandatangani perjanjian tersebut dan Indonesia kemudian mengambil langkah sepihak dengan melakukan pembubaran Uni Indonesia-Belanda. Namun, akibat dari pembubaran sepihak ini menyebabkan pengusaha-pengusaha Belanda menjual perusahaannya kepada etnis Tionghoa. Sementara itu, pengusaha pribumi belum mampu mengambil alih perusahaan-perusahaan tersebut.

Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT)

Salah satu program kerja dari Kabinet Ali II yaitu memulihkan negara dari berbagai aspek termasuk aspek ekonomi. Mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai, menyeimbangkan keuangan negara, mewujudkan perubahan dari ekonomi kolonial menjadi ekonomu nasional untuk kepentingan rakyat dan pembatalan perjanjian KMB yang berdampak pada segi ekonomi. Kabinet Ali II membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang disebut dengan Biro Perancang Negara dengan

tugasnya untuk membuat rancangan pembangunan jangka panjang. Adapun rancangan yang berhasil dibuat yaitu Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT) dengan biaya sekitar 12,5 miliar.

Kabinet Ali II melakukan pembatalan terhadap perjanjian KMB antara Indonesia dengan Belanda. Hal ini kemudian menimbulkan masalah baru terhadap nasib modal pengusaha Belanda di Indonesia. Akibatnya, terdapat banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya ke orang-orang China. Orang China dianggap kuat dalam sistem ekonominya sehingga mereka lebih memilih menjualnya kepada mereka dibanding pribumi. Kemudian memunculkan gerakan untuk melindungi pengusaha nasional yang disebut dengan Gerakan Assaat. Selain itu, menimbulkan juga gerakan semangat anti-China di kalangan Masyarakat. Gerakan ini dianggap sebagai gerakan diskriminasi terhadap etnis Tionghoa. Kabinet ini sebenarnya nyaris tidak dapat berbuat apa-apa dalam bidang ekonomi karena terlalu sibuk mengurus masalah rasa tidak puas terhadap pemerintah dari luar Pulau Jawa. Berbagai masalah lain seperti penyelundupan menyebabkan defisit anggaran negara. Akhirnya Indonesia menerima bantuan dari IMF sebesar US\$ 55 juta dan mengajukan undang-undang tentang penanaman modal asing.

Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap)

Adapun program yang dicetuskan oleh kabinet Djuanda yaitu membentuk Dewan Nasional, normalisasi keadaan negara, pembatalan KMB, perjuangan Irian Barat, dan mempercepat pembangunan yang dilakukan untuk menghadapi pergolakan daerah dan juga untuk menghadapi masalah ekonomi serta keuangan yang memburuk. Masa Kabinet

Djuanda masih terjadi ketegangan antara pusat dan daerah hasil dari Kabinet Ali II sehingga hal ini harus diatasi dengan Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap). Tujuannya yaitu untuk mengubah rencana pembangunan agar dapat menyeluruh dan dalam jangka yang panjang.

Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap) ternyata tidak dapat berjalan dengan baik. Hal ini terjadi karena kesulitan dalam menentukan skala prioritas, ketegangan politik, adanya pemberontakan PRRI/ Permesta yang mana membutuhkan banyak biaya untuk menumpasnya serta memuncaknya ketegangan antara Indonesia dengan Belanda mengenai Irian Barat.

KESIMPULAN

Penerapan sistem demokrasi liberal di Indonesia membuat perubahan-perubahan yang berdampak kepada kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah yang sedang berkuasa. Setelah penyerahan kedaulatan secara resmi oleh Belanda pada 1949, Indonesia masih tetap menggunakan demokrasi liberal. Namun, dalam pelaksanaannya tidak berjalan dengan lancar karena beberapa alasan yaitu beban utang yang ditanggung setelah penandatanganan KMB, pengeluaran yang membengkak, inflasi serta defisit anggaran negara. Pada masa Kabinet Hatta, dilaksanakanlah kebijakan Gunting Syafruddin untuk mengatasi defisit anggaran dan inflasi. Secara jangka pendek kebijakan ini berhasil untuk sedikit mengatasi inflasi dan uang yang beredar di masyarakat. Kemudian, setelah Indonesia kembali menjadi negara kesatuan pada 1950 pemerintahan Indonesia dipimpin oleh Kabinet Natsir. Kabinet ini mencetuskan Gerakan Benteng yaitu pemberian modal kepada pengusaha pribumi. Namun, kebijakan ini juga

tidak berhasil karena terjadi penyelewengan dalam pelaksanaannya. Kabinet Sukiman melakukan nasionalisasi terhadap De Javasce Bank, namun defisit anggaran terjadi akibat nasionalisasi ini. Kebijakan Ali-Baba juga ternyata disalahgunakan dan dianggap sebagai diskriminasi terhadap etnis Tionghoa. Persetujuan Finansial Ekonomi (Finek) tidak mendapatkan kesepakatan sehingga berdampak pada pembubaran Uni Indonesia-Belanda secara sepihak. Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT) untuk membuat rancangan pembangunan jangka panjang dan Musyawarah Nasional (Munap) tidak berjalan dengan baik pula. Kegagalan-kegagalan dalam kebijakan yang dicetuskan disebabkan beberapa alasan yaitu pergantian kabinet yang terlalu sering dan dalam waktu yang berdekatan, belum kuatnya sistem perekonomian Indonesia dan terjadinya berbagai masalah yang mengganggu kestabilan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Koran:

Sedar, 10 November 1950.

Java-bode: nieuws, handels-en advertentieblad voor Nederlandsch-Indie, 13 Maret 1953.

Merdeka, 9 Juli 1953.

De nieuwsgier, 8 Februari 1954.

Kompas, 13 Maret 1987.

Buku dan Jurnal:

Konstituante Republik Indonesia. 1959. *Risalah Perlindungan Tahun 1959 Jilid I*.

Azizah, A. N. 2019. "Aktivitas Politik Syafruddin Prawiranegara Tahun 1937-1961." *Thesis* UIN Sunan Gunung Djati.

Diapepin, Mukti. 2020. "Memulihkan Komunikasi Belajar dari Jatuh

Bangunnya Kabinet pada Masa Demokrasi Parlementer." *TATHWIR: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 11, No. 1.

Hartanto, Hadi. 2005. "Sejarah Pertentangan Soekarno-Hatta dan Pengaruhnya terhadap Kebijakan Politik Indonesia (1956-1965)." *Thesis* Universitas Negeri Semarang.

Maulana, Andy. 2018. "Kebijakan-Kebijakan pada Masa Pemerintahan Kabinet Wilopo di Indonesia Tahun 1952-1953." *Thesis* Universitas Pendidikan Indonesia.

Malintan, Dias Anjar. 2019. *Perkembangan Politik dan Ekonomi Masa Demokrasi Liberal*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Muwafiq, Ahmad dkk. 2022. *Demokrasi Liberal (1950-1959) dan Demokrasi Terpimpin (1959-1966)*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.

Myeisha, Aquilina Nabila. 2020. "Kebijakan Gunting Syafruddin dan Dampak Sosial Ekonomi terhadap Masyarakat Indonesia: Sebuah Analisis Berita Koran-Koran (Maret-Agustus 1950)." *Thesis* Universitas Andalas.

Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto. 2011. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI: Zaman Jepang dan Zaman Republik*. Jakarta: Balai Pustaka

Setiawan, Johan dkk. 2018. "Sistem Ketatanegaraan Indonesia pada Masa Demokrasi Liberal Tahun 1950-1959." *Jurnal HISTORIA*, Vol. 6, No. 2.

Simanjuntak, P. N. H. 2003. *Kabinet-Kabinet Republik Indonesia: Dari Awal Kemerdekaan sampai Reformasi*. Jakarta: Djambatan.

Sinaga, Reny Y. 2022. "An Interpretive and Critical Paradigm Study of the 'Gerakan Ekonomi Benteng' in Indonesia." *The*

Scientia Journal of Economics Issues, Vol. 1, No. 10.